



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR  
PENGARAIAN NOMOR 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg TENTANG  
ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG  
DILAKUKAN SETELAH HAMIL DILUAR NIKAH**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**Oleh**

**SUKNI RUSIDAH**  
**11521205046**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2019 M**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah, yang ditulis oleh :

Nama : Sukni Rusidah  
NIM : 11521205046  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Lantai 3(tiga) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**  
Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, M.Ag**  
Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**  
Penguji II  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**

.....  
.....  
.....  
.....

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/Pa.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah” yang ditulis oleh :

Nama : SUKNI RUSIDAH

NIM : 11521205046

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2019

Pembimbing Skripsi

HAIRUL AMRI M.Ag  
NIP : 19730823 2001121003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Sukni Rusidah (2019): Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil Di Luar Nikah**

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang dilakukan setelah Hamil di Luar Nikah. Latar belakang judul ini yaitu adanya pernikahan siri yang mana wanita tersebut dalam keadaan hamil ketika menikah dan diisbatkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tentang isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah,serta bagaimana analisis putusan hakim tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library reseach) yang bersifat studi kasus. Data berupa putusan Pengadilan Pasir Pengaraian nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg, data sekunder buku-buku yang berkaitan dengan judul yang menunjang penelitian tersebut .Teknik pengumpulan data dokumentasi, dan studi pustaka.Teknik analisa content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pengadilan Agama Pasir Pengaraian menerima putusan isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah adalah untuk menghindarkan dari segala kemadharatan dan untuk mendapatkan kemaslahatan baik secara yuridis, maupun filosofis. Dan analisis hukum Islam terhadap sahnya pernikahan nikah siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah menurut KHI dan sebagian ulama Hanafiyah menikahi wanita hamil akibat zina ialah sah, karena tidak ada larangan menikahi wanita hamil dan tidak ada terdapat dalil *qath'I*, terlebih lagi menikahi wanita hamil akan berkait dengan masalah nasab dan pada intinya isbat nikah yang dikabulkan adalah untuk menghindari dari kemadharatan dan mendapatkan kemaslahatan.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw, mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Skripsi ini berjudul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah.**

Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak manapun. Untuk itu Penulis haturkan rasa terima kasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda Muhammad Yusuf , ibunda Kartini , abang Jul Hakimi yusuf, Jul Andri Jusni Yusuf, dan beserta saudara dan saudariku yang selalu memberikan doa, dorongan dan motivasi untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. H, Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan beserta staf yang telah memberikan pelayanan Akademik selama proses perkuliahan Penulis.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Khiarul Amri, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi dan serta bapak Zainal Arifin, Drs.MA Pembimbing Akademis penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Burhanudiin S.H., M.H selaku Panitera Hukum di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah membantu penulis dalam pencarian data.
7. Terimakasih kepada sahabat sahabat yang slalu mendukung memberi motivasi slama menulis skripsi, Nurma Sriyatun, Putri Yanti, Yulia Citra Dewi, Roikhatul Jannah, Siti asyiah dan kawan serumah semejak masuk kuliah Retno Indah saputri.
8. Teman-teman angkatan 2015 khususnya jurusan Hukum keluarga UIN Suska Riau yang sama-sama berjuang bersama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa kalian semua ini tidak akan ada artinya. Hidupku terlalu berat untukku jalani sendiri. Maka dari itu tidak ada tempat lain untuk berkeluh kesah selain bersama keluarga, sahabat, orang-orang tersayang. Untuk ribuan tujuan harus dicapai, untuk tujuan impian yang akan dikejar, untuk sebuah harapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena target terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak menjadi bayangan semu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan. Sebagai penutup penulis mohon ampun dan pertolongan kepada Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kekuatan lahir dan batin. Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Pekanbaru, 04 November 2019  
Penulis

**SUKNI RUSIDAH**  
**NIM. 11521205046**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .....	12
B. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ...	13
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama pasir Pengaraian .	14
D. Uraian Tugas Pengadilan Agama Pekanbaru .....	17
E. Visi Misi Pengadilan Pasir Pengaraian .....	21
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI</b>	
A. Isbat nikah .....	22
B. Nikah Siri .....	39
<b>BAB IV ANALISIS YURISPRUDENSI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NOMOR 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH HAMIL DI LUAR NIKAH.</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 0066/PDT.P/2018/PA.PPG Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Di Luar Nikah.....	45





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

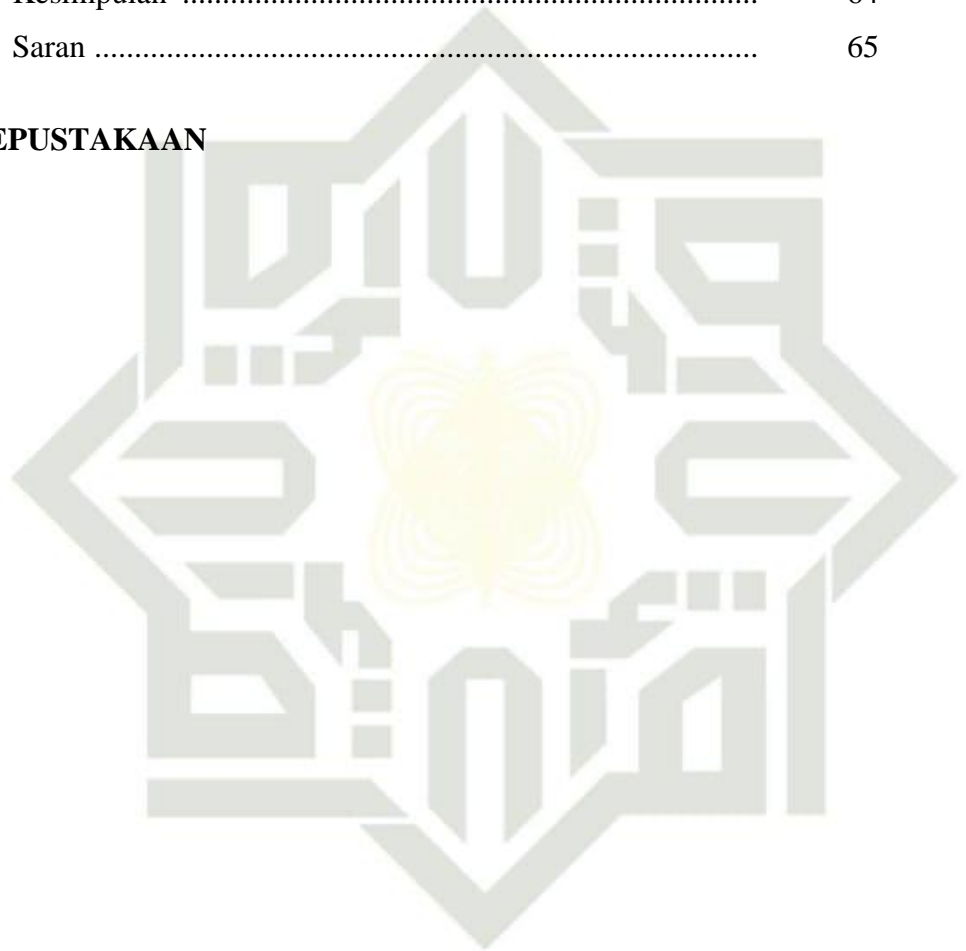
B. Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah .....	52
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kabupaten Rokan Hulu (Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian ) .....	12
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.	16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada manusia. Nikah menurut bahasa: *al-jum'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.<sup>1</sup> Perkawinan secara istilah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu selanjutnya disebut (Undang-undang Perkawinan), yang merumuskan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>2</sup>

Jadi, arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasang siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *fiqh munakahat*, (jakarta : PT raja grafindo persada,2008), h. 8.

<sup>2</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), h. 423.

<sup>3</sup> Yuli Fajar Susetyo, *Mengembangkan Perilaku Mengajar Yang Humanis*, Warta Hukum dan Perundang-Undangan Vol. 8 No. 2, Jakarta, 2007, h. 26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang.”<sup>4</sup>

Perkawinan di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut bersifat universal bagi umat Islam di Indonesia. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum yang di anut serta di catatkan kepada petugas pencacatan perkawinan. Dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang ketentuannya terdapat di dalam Undang-Undang.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”<sup>5</sup> dalam pasal ini tersebut dapat dipahami perkawinan di Indonesia menghendaki adanya pencacatan perkawinan sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan lainnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa “*perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.*”

Pencacatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Jadi, sangat jelas bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al quran dan Terjemahannya*, ( Jawa Barat: CV diponegoro, 2010.h.406.

<sup>5</sup> *Undang-Undang republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006 ) h.40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakannya harus lah diikuti sepanjang untuk kebaikan ataupun perlindungan rakyatnya.<sup>6</sup>

Fakta yang terjadi di Indonesia masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi ke Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak dicatat sering kali disebut nikah siri. Pada awalnya nikah siri diajukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Beliau hanya menandatangani pengaduan perkara perkawinan yang hanya di saksikan laki-laki dan saksi perempuan. Jika mereka melanjutkan perkawinan, menurut Umar bin Khatab termasuk melakukan zina dan wajib mendapatkan hukuman *jilid* (dera atau cambuk ). Namun pada saat ini, pernikahan siri lebih diperluas yakni termasuk perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan tetapi belum atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ( KUA ) bagi umat Islam.<sup>7</sup>

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya hidup bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, adalah anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak. Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta :Gama Media,2001 ),h.108.

<sup>7</sup> Neng Dzubaidah, *Pencacatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Tercatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika,2010 ) h.345.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masyarakat untuk mencatatkan perkawinan. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan.

Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak untuk melanjutkan sekolah harus menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran, maka dari itu orang tua harus melakukan isbat nikah ke pengadilan untuk mengesahkan secara hukum pernikahannya. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).<sup>8</sup>

Isbat atau Penetapan menurut Undang-Undang Pengadilan Agama adalah keputusan pengadilan atau perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUP dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UUP.<sup>10</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkara Isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan :

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka, 1995 ), h. 339.

<sup>9</sup> Jenderal Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Pengadilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Badilag, 2010), h. 544.

<sup>10</sup> Yayan sofyan, *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diperlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, ( Jakarta selatan: Ahkam, 2002) hal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 3 tahun terakhir, tahun 2016 perkara yang masuk 56 dan dikabulkan 51, pada tahun 2017 adanya peningkatan perkara yang masuk 78 perkara dan yang diputuskan 73, tahun 2018 mencapai 62 perkara yang masuk, dan diputuskan 59, dan sebanyak 3 perkara yang tidak dikabulkan pada tahun 2018<sup>11</sup>. Seperti kasus yang terdapat dalam penetapan nomor : 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Pemohon I (suami) dan Pemohon II (istri) yang mengajukan isbat nikah ke pengadilan.

Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan siri pada tahun 2013, bahwa sebelum menikah saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan 18 tahun, setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak, mereka mengajukan isbat nikah supaya memperoleh pengesahan dan akta kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II.<sup>12</sup> Berdasarkan pernyataan saksi bahwa pemohon II sedang dalam keadaan hamil ketika pernikahan siri dilangsungkan. Dalam kasus ini

<sup>11</sup> Laporan Buku Tahunan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

<sup>12</sup> Berkas penetapan nomor : 0066/Pdt.P/2018/PA.PPg

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

majelis hakim pengadilan mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya tanpa memenuhi syarat pernikahan, karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I usianya masih berumur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menjelaskan bahwa seorang calon suami harus mencapai umur 19 tahun dan seorang calon istri harus mencapai umur 16 tahun.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini, mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan sah perkawinan antara Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 06 september 2018 di Kabupaten Rokan Hulu. Artinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sama dengan melegalkan (mengesahkan) nikah dibawah tangan atau nikah Siri.

Berdasarkan penetapan Majelis Hakim, perkawinan yang terjadi antara kedua Pemohon yaitu Pemohon I masih berusia 16 Tahun, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan ada batasan umur untuk melakukan pernikahan, dan majelis hakim mengabulkan dan menetapkannya. Sesuai latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk meneliti perkara ini sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Keputusan Pengadilan Pasir Pengaraian **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah.**

**B. Batasan Masalah**

Pembahasan penelitian ini terfokus pada Tinjauan Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah.

**C. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah di atas maka Penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana analisis putusan hakim tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan yang akan di teliti, diantaranya yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui analisis putusan hakim Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil diluar Nikah.

**2. Manfaat penelitian**

- a. Untuk menambah khazanah ilmu bagi Penulis dan masukan ilmu pengetahuan.
- b. Sebagai syarat bagi Penulis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk Penulis dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

**E. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>13</sup>

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library reseach), yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan. Yakni dengan meneliti atau menelaah buku atau literature dan tullisan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Yaitu pertimbangan hakim dalam

---

<sup>13</sup> Amiruddin dkk, *pengantar metode penelitian hukum*, (jakarta: PT Grafindo persada, 2006).h.19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah, dan analisis terhadap putusan hakim. Maka jenis penelitian ini disebut penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah hakim dan panitra. Sedangkan objek dalam penelitaian ini putusan no 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg.

## **3. Sumber Data**

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari dua macam

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema penelitian. Bahan hukum primer ini, yaitu putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian perkara No 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang isbat nikah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjadi pendukung dan pelengkap yang berhubungan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, ensiklopedia hukum, skripsi, jurnal dan makalah yang disajikan dalam seminar nasional maupun internasional.

## **4. Teknik Analisa Data**

Dari sejumlah data yang berhasil penulis simpulkan, setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode yang dikenal dengan metode analisis (*content analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang. Adapun teknik yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Deduktif dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi kata khusus.
- b. Induktif dengan metode ini juga penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.

## F. Sistematis Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menyajikan dan memakai sistematika yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai lokasi dan letak geografis, sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengarain, struktur organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengarain, visi dan misi serta uraian tugas dan fungsi pengadilan Agama Pasir Pengarain.

### **BAB III : TINJAUAN TEORI**

Bab ini membahas tentang pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, sebab-sebab isbat nikah, prosedur isbat nikah, syarat-



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah, kepastian hukum isbat nikah terhadap status anak, pengertian nikah siri, dasar huukum nikah siri, siri menurut prespektif hukum positif, siri menurut prespektif hukum islam.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Membahas tentang Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg, Bagaimana analisis putusan hakim Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil diluar Nikah.

**BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA

#### PASIR PENGARAIAN

##### A. Yuridiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan terdiri, yaitu : Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Kabun, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam.



**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Rokan Hulu (Yuridiksi**  
**Pengadilan Agama PasirPengaraian )**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdiri pada tahun 1972. Berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan surat keputusan menteri agama RI No.34 tahun 1972. Dalam surat keputusan tersebut secara tegas'' Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pangaraian''.<sup>14</sup>

Ketika awal berdirinya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Pada saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dipimpin oleh Abbas Hasan selain bertindak sebagai ketua di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian definitive pada tanggal 28 Agustus 1975, ia juga menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama pekanbaru.

Sejak saat itu pengadilan Agama Pasir Pngaraian telahh melakukan tugasnya sesuai wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan pemerintahan No.45 tahun 1957.

Untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga haki m honorer masing-masing bernama M.Saleh KUA, A. Jabal, Hasaniddin, Pakih Mukhtar dan M.Bakar. Ia juga dibantu oleh seseorang panitera bernama : Surat M, yang dahulunya dari pegawai kantor Depertemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian .

<sup>14</sup> Alimin Patawari, *Mengakhiri Pengabdian Sebagai Hakim Di Bumi Lancang Kuning*, (Pekanbaru :Yayasan Gahara Muda Sehati , 2019 ) h.269-270





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah menjalankan tugasnya dihari kerja yang bertempat di rumah penduduk yang bernama Habibah dengan hak sewa, Kemudian kantor pindah tempat di kantor Wali Nagari Rambah. Dan pada tahun 1994 barulah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mempunyai gedung sendiri dengan luas 200 M<sup>2</sup>.

Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) desa dan Pengadilan Agama Pasir

Pengaraian masuk dalam wilayah kabupaten Rokan Hulu, maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M<sup>2</sup> menjadi 640 M<sup>2</sup> dengan luas tanah 1.200 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.<sup>15</sup>

#### Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadinya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan Sekretaris membawahi Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Keuangan dan Umum.

Pimpinan pengadilan agama Pasir Pengaraian, berikut ini adalah daftar pimpinan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian:

<sup>15</sup> Ibid, h. 271



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ketua

1. Drs. H. Abbas Hasan (periode 1972-1973)
2. Drs. H. Daman Huri (periode 1977-1998)
3. Drs. Sy. Efendi Siregar (periode 2001-2005)
4. Drs. Nur Muhib, M.H (periode 2006-2010)
5. Drs. Mustar, M.H (periode 2011-2014)
6. Drs. H. ahmad Musa Hasibuan (periode 2014-2015)
7. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2016-2017)
8. Dra. Erina, M.H (periode 2017-2018)

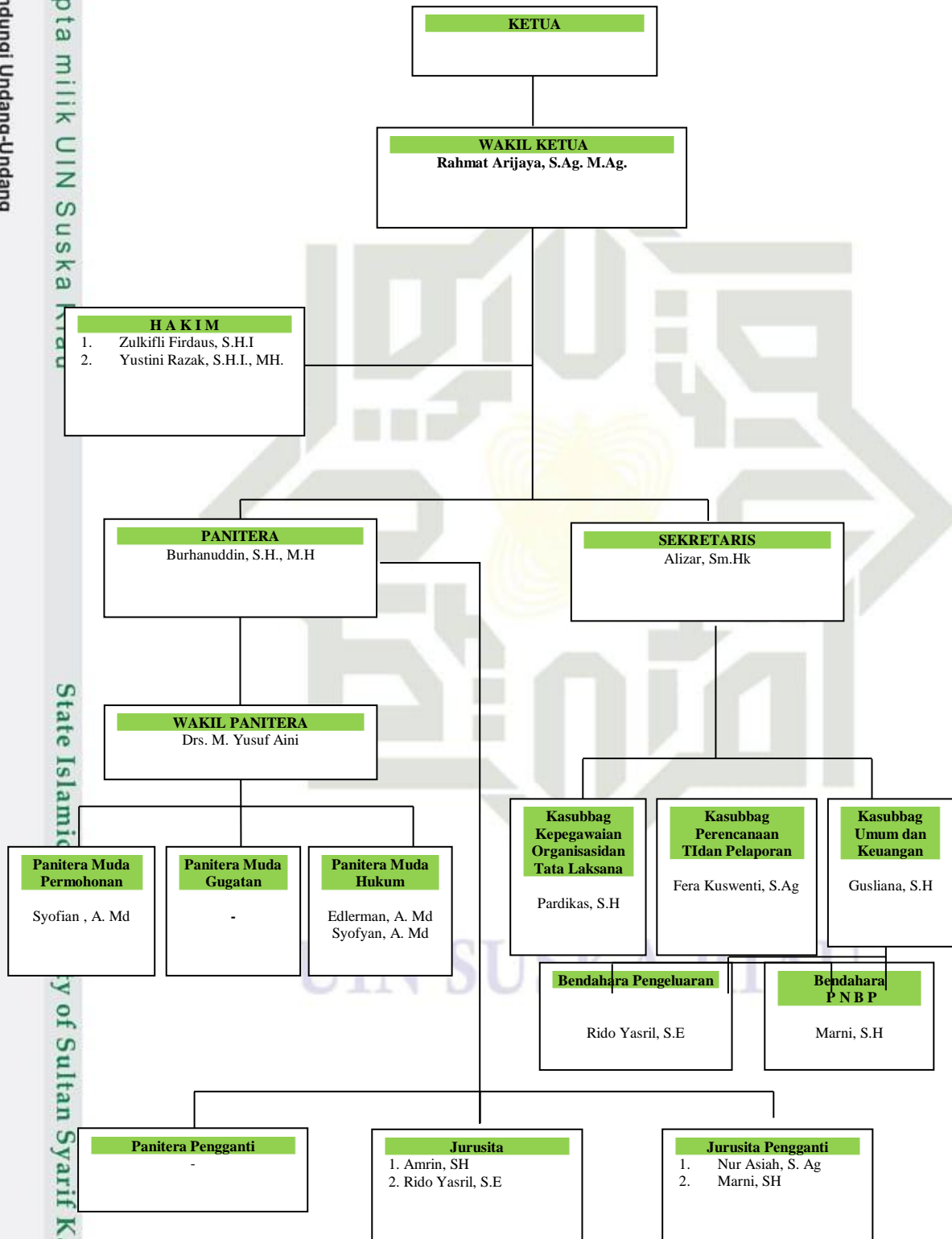
b. Wakil Ketua

1. Drs. H. Barmawi, M.H (periode 2006-2011)
2. Drs. Kharuddin (periode 2011-2014)
3. Dra. Hj. Rukiah sari (periode 2014-2016)
4. Elidasniwati, S.Ag. M.H (periode 2017-2018)

Saat ini aparaturnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, yaitu 3 orang hakim termasuk wakil ketua. Bagian kepaniteraan 8 orang, yaitu panitera, wakil panitera, panmud hukum, dan panmud permohonan, 2 orang juru sita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian kesekretariatan 4 orang, yaitu sekretaris, kasubbag PTIP, kasubbag Kepegawaian dan Ortala, kasub bag keuangan dan umum.



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

ity of Sultan Syarif Kasim Riau





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Uraian tugas di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

Adapun uraian tugas pokok struktur organisasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut:

1. Ketua
  - a. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
  - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlak karimah.
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.
2. Wakil Ketua
  - a. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
  - b. Membantu ketua dalam melakukan eksaminasi putusan/penetapan hakim dan putusan.
  - c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian dalam tim dll.
3. Hakim
  - a. Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya.
  - b. Menyelesaikan minutasi.
  - c. Melaksanakan tugas sebagai hakim pengawas bidang dll.
4. Sekretaris
  - a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan  
Mengkoordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan.

5. Panitera

- a. Koordinasi dan pengawasan kegiatan kepanitraan
  - 1) Mengatur pembagian tugas kepanitraan kepada panitra muda, panitra pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  - 2) Mengkoordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang diajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- b. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan
  - 1) Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP), pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
  - 2) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.
- c. Pembinaan staf
  - 1) Memberi pengasahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

6. Panitera muda gugatan
  - a. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar bundel isi A yang diserahkan kepadanya.
  - b. Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua majelis di kepaniteraan muda gugatan.
  - c. Berkas perkara yang telah diregister dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada wakil panitera untuk diserahkan kepada ketua PA Pasir Pengaraian dll.
7. Panitera muda hukum
  - a. Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat sub bidang kepaniteraan muda hukum.
  - b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama.
  - c. Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin dll.
8. Panitera pengganti
  - a. Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti.
  - b. Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara.
  - c. Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis dll.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Wakil sekretaris
  - a. Mengkoordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahan tanggaan kantor lainnya.
  - b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik negara dan administrasi lainnya.
  - c. Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuatan komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dll.
10. Kasub bag kepegawaian
  - a. Menyelenggarakan administrasi dibidang kepegawaian.
  - b. Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
  - c. Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat dan daftar pulang pegawai Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dll.
11. Kasubbag umum
  - a. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum.
  - b. Melaksakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai dengan bidang sub umum.
  - c. Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor.
12. Kasubbag keuangan
  - a. Menyelenggarakan administrasi di bidang keuangan.
  - b. Membuat perencanaan anggaran PA Pasir Pengaraian.
  - c. Meminitor pembukuan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas dll.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Medan : Duta Karya, 1995), H.17



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

### **Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung

### **Misi**

1. Meningkatnya Profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang modern
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pasir .<sup>17</sup>

<sup>17</sup><https://wwwss.pa-pasirpengaraian.go.id>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### ISBAT NIKAH DAN NIKAH SIRI

#### A. Isbat Nikah

##### 1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat berasal dari bahasa Arab ( اثبات ) ( artinya penetapan, pengukuhan atau pengiyaan (isbat). Atau تثبت - ثبات - وثبوتا ( artinya tetap, kekal, abadi atau stabil. Atau dengan kata lain yaitu اثبت – يثبت - ثبت ( artinya menetapkan, menguatkan dan mengukuhkan.<sup>18</sup>

Isbat nikah mengandung arti suatu penetapan kepada pengadilan melalui permohonan karna pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.<sup>19</sup> pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>20</sup>

Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama dalam bentuk penetapan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya dan istilah *jurisdiction volunta* dikatakan bukan pengadilan sesungguhnya, karena

<sup>18</sup> Ahmad Warson, *Munawir, Kamus Al - Munawir*, (Surabaya: Progresif, 1984), h. 145

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h.117.

<sup>20</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Bertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 212





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkara ini hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan atau pemohon ditegaskan tentang sesuatu hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain).<sup>21</sup>

Dalam pasal 1 UU No.22 ditentukan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk.<sup>22</sup> Definisi lain isbat nikah adalah pengesahan atau penetapan nikah karena, adanya perkawinan dalam rangka perceraian, hilangnya akte nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang- undang perkawinan yaitu undang - undang nomor 01 tahun 1974 sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>23</sup>.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

<sup>21</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta :PT Raja Grafindo 2007 ), cet Ke-13 h.59

<sup>22</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana 2010 ) h.294

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Di Indonesia Kompilasi Hukum Islam*, ( Jakarta : CV. Akademik presindo, 2010 ),h.115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.<sup>24</sup>

Pelaksanaan isbat nikah pada dasarnya diperuntukkan pada hal tertentu saja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, namun fakta dilapangan menunjukkan banyaknya perkara isbat nikah yang masuk di lingkungan Peradilan Agama diluar ketentuan perundang-undangan, misalkan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah umur.

Peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan menjadikannya sebagai satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan, yang berarti secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan persoalannya secara hukum dibelakang hari, namun di sisi lain perundang-undangan membuka pintu bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui Instansi Pemerintah yang resmi yaitu Pengadilan Agama dengan dibukanya keran bagi penetapan nikah mereka (isbat nikah).

## **2. Dasar Hukum Isbat Nikah**

Dalam Islam aturan mengenai pencatatan nikah perkawinan tidak disebut dengan rinci atau tersurat bahwa pencacatan perkawinan merupakan salah satu syarat sah nya perkawinan. Tetapi menurut hukum

---

<sup>24</sup> Ibid.107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam persoalan pencacatan perkawinan dapat dipandang sebagai masalah darurat. Ketentuan umum bagi sahnyanya suatu perkawinan adalah hasil ijtihad kerana tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun hadist. Hukum ijtihad dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadist atau pun *maqashid syariah*.<sup>25</sup> Berdasarkan kaidah ushul fiqh, yaitu “ *hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman*”.

Islam tidak mewajibkan adanya pencacatan perkawinan, namun dari segi manfaat pencacatan perkawinan sangat diperlukan. Karena penetapan perkawinan dapat sebagai alat bukti otentik seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>26</sup>

Putusan Hakim berdasarkan ijtihadnya senantiasa akan mendapat pahala disisi Allah Swt sekalipun salah, asalkan dia memiliki otoritas serta ahli dibidangnya (seorang mujtahid). Dalam hadits nabi Muhammad Saw: “*Apabila Hakim memutuskan (perkara) kemudian dia berijtihad dan hasil ijtihadnya benar (tepat) maka baginya dua pahala. Sedangkan apabila berijtihad dan hasil ijtihadnya salah (tidak tepat) maka ia mendapatkan satu pahala*”( H.R. Muslim).<sup>27</sup>

Pada dasar nya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang

<sup>25</sup> Hujaemah Tahindo Yunggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, ( Jakarta : Ghilia Indonesia, 2010 ),h.128

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003 ), h.123

<sup>27</sup> Al - Imam Al - Hafiz Abi Husain Muslim, *Shohih Muslim*, (Riyad: Darul Tayyibah, 1426 H), h., 518



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan ada nya pencatatan nikah Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1),dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang –undang No.32 Tahun 1954.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat 2 disebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan kata nikah dapat diajukan isbat ke Pengadilan Agama dan dalam pasal tersebut lebih dijabarkan lagi yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal - hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian
2. Hilangnya Akte Nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang - undang nomor 01 tahun 1974.<sup>28</sup>

Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2)

<sup>28</sup> Alhamdani, *risalah nikah*, (Jakarta :pustaka amani,2002), h,336

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, disebutkan:

- a. Aturan pengesahan nikah atau isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b. Pengesahan Nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) undang - undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka 22 penjelasan undang - undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang nomor 03 tahun 2006 dan berubah kedua dengan undang - undang nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan undang – undang Nomor 07 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 03 tahun 2006 dan berubah kedua dengan undang - undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya undang - undang Nomor 01 tahun 1974 , akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya undang -

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Nomor 01 tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

- d. Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan satu menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e. Untuk menghindari adanya penyeludupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama harus selektif dan hati - hati dalam menangani permohonan isbat nikah.<sup>29</sup>

**3. Sebab - sebab Isbat Nikah**

Adapun permasalahan perkawinan yang dapat diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, yaitu terbatas mengenai beberapa hal, yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang - undang Nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang – undang Nomor 01 tahun 1974.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan, 2010), h., 14 3

<sup>30</sup> Ibid.h.36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Prosedur Isbat Nikah

Aturan Pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh Agama akan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/Isbat nikah dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata yang lain yaitu sebagaimana dijelaskan didalam buku Peradilan Agama di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu<sup>31</sup>

a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan

Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. untuk menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugatan atau permohonan. Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan, atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP).

b. Membuat surat permohonan isbat nikah.

Surat permohonan dapat dibuat sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, “Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) hal. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas Pengadilan, satu fotokopi anda simpan.
- d. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.
- e. Penggugat wajib membayar uang muka atau biaya ongkos berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR).
- f. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian berperkara sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku register

Setelah didaftarkan, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.

Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat, Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secarat patut. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam Berita Acara Persidangan(BAP).<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Mahkamah Agung RI , *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010), hal. 29



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.

Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada Pemohon/Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.

Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda diantaranya wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.

Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/ penetapan isbat nikah. Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.

Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Syarat-Syarat Seseorang Yang Berhak Mengajukan Permohonan Isbat Nikah:

- a. Suami atau istri
- b. Anak-anak mereka
- c. Wali nikah
- d. Pihak-pihak yang berkepentingan

Sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 7 ayat 4 yang berbunyi; yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Selanjutnya akan diuraikan 41 tentang prosedur pengajuan isbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain.<sup>33</sup>

1. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon):
  - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
  - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia
2. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):

<sup>33</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010) , hal. 30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut ;
- c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

**6. Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Anak**

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi perkawinan yang tidak ada bukti dicatatkan oleh lembaga berwenang yang memenuhi peraturan syara<sup>34</sup>, tentunya isbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dalam hal ini, kepastian hukum tentang status anak di antaranya dapat dilihat dari peraturan berikut ini:<sup>34</sup>

- a) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada Pasal 28- B ayat (1), yaitu: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

<sup>34</sup> Mukti Arto, *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnyanya perkawinan*, *Mimbar Hukum* No. 28 tahun VII (Jakarta: Al Hikmah dan DitbinpaEra Islam, 1996 ) hal 51-52

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 42, yaitu : "Anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah"
- c) Pasal 2 ayat (1), yaitu : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";
- d) . Pasal 2 ayat (2), yaitu : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ";
- e) Pasal 99 KHI, Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- f) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dilihat dari alasan pengajuan isbat nikah, alasan utama para pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama adalah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka di samping untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan para pemohon itu sendiri. Ini berarti para orang tua (ayah-ibu) ingin memperjelas status anak-anak mereka yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah.

Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya di nisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara yuridis mereka





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan.

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyebutkan aturan hukum perlindungan anak dalam Pasal 41, bahwa ketika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pendidikan dan pemeliharaan diperlukan anak. Dan upaya mempertegas dalam memberikan perlindungan anak, negara telah melakukannya secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan keharusan memberikan perlindungan kepada anak, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Di antara organ dan atau komponen yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, adalah negara dan pemerintah. Kewajiban negara dan

<sup>35</sup><http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolomt,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.php> diakses pada tanggal 28 juli 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2002 dinyatakan, “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Isbat nikah oleh Pengadilan Agama oleh para pemohon digunakan sebagai alas hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan akan mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah tercatat, untuk selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak pada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahinya dengan dilampiri penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dengan isbat nikah mempunyai andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

Mereka yang selama ini tidak memiliki Kartu Keluarga karena tidak mempunyai Buku Nikah, setelah adanya penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama mereka akan mudah mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak-anaka mereka sehingga sudah tidak kesulitan untuk masuk sekolah. Bahkan, calon jamaah haji yang tidak mempunyai Buku Nikah sangat terbantu dengan isbat nikah oleh Pengadilan Agama untuk mengurus paspor.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (Pasal 5 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) dan untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti otentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.<sup>36</sup>

Terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan salah satu produk politik sosial sebagai deposit politik sosial modern. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama (Islam), tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (tajdid an-nikah) karena hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.311





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemecahan masalah agar anak yang dilahirkan dari perkawinan yang demikian agar mendapatkan status hukum dapat ditempuh sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Bukti-bukti dalam hal ini harus dikembalikan kepada asas umum pembuktian sesuai Pasal 284 Rbg dan 164 HIR 48 untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah ditambah bukti lain berupa bukti hasil pemeriksaan tes DNA untuk membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar dilahirkan dari suami istri itu. Solusi ini juga sebenarnya mengandung konsekwensi apabila seorang anak dinyatakan sebagai anak sah dari hasil perkawinan di bawah tangan tersebut, walaupun tidak dinyatakan secara tegas, akan berakibat secara tersirat pengadilan telah mengakui adanya perkawinan yang menurut undang-undang terdapat halangan.<sup>37</sup>

Akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkannya dari perkawinan yang telah memenuhi peraturan syara’ tidak dapat dinyatakan sebagai anak zina yang identik dengan anak di luar perkawinan, melainkan sebagai anak yang sah dengan segala konsekwensi hukumnya, seperti akibat perkawinan tidak tercatat itu menyebabkan anak-anak yang dilahirkan nasabnya dihubungkan kepada kedua orang tuanya itu, demikian pula hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak seharusnya berjalan sebagai mana

<sup>37</sup><http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,Kolomt,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx> diakses pada tanggal 28 juli 2019.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mestinya, di antara mereka dapat saling mewarisi satu dengan yang lainnya dan apabila anak yang dilahirkan itu perempuan, maka ayahnya berhak menjadi wali anak perempuannya berlaku secara natural (alamiah) saja. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum harus dilakukan itsbat nikah di pengadilan Agama.

## B. Nikah Siri

### 1. Pengertian Nikah Siri

Istilah nikah siri adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan siri yang dalam kitab (السرى الشواج) disebut fiqh sebagai rangkaian dari dua kata yaitu (سوخ) (السرى الشواج) merupakan bentuk masdar (السرى) (dan الشواج) (yang menurut bahasa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-siri* (السرى الشواج) dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara rahasia.<sup>38</sup>

Pengertian nikah siri secara terminologi fiqh Maliki adalah nikah yang atas pesan suami, agar para saksi merahasiakan perkawinannya terhadap istrinya dan masyarakat.<sup>39</sup> Perkawinan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, yaitu telah terpenuhi syarat dan rukun nikah yang sebagaimana yang diatur menurut ajaran agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, namun

<sup>38</sup> Burhanudin, *Nikah Siri Menjawab semua Pertanyaan Nikah Siri*, Pustaka Yustisia, Jakarta, h.13

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhailly, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid VII, penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus, h.71

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memenuhi norma hukum karena tidak dicatat pada pegawai pencacatan nikah sebagaimana kehendak pasal 2 ayat (2) UU perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawaniannya dilembaga pencacatan formal.

Istilah nikah siri mulai dikenal dikalangan masyarakat Indonesia setelah diberlakunya UU perkawinan. Istilah lain dari nikah siri adalah *nikah dibawah tangan* yang dimaksud adalah nikah yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang. Prosedur yang ditetapkan undang-undang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasaal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Perkawinan, bunyi pasalnya berikut

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam masing masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Nikah Siri

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menimbang bahwa ditengah masyarakat sering ditemukan adanya pernikahan dibawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan,yang jelas tidak jarang menimbulkan dampak negatif (madharrah) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya,bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal,28 Rabi'ul Tsani 1427/ 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah di bawah Tangan.

<sup>40</sup> Anshary, *kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, (Bandung, Redaksi Mandar Maju), 2014. h.130





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa oleh karna itu Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman, sebagaimana didalam al-qur'an firman Allah SWT surah Ar-rum {30}:21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Fatwa Tentang Nikah Dibawah Tangan adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencacatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan di dalam ketentuan hukum pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karna telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*, pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/ *madharrah* (saddan lidz-dzariah).<sup>41</sup>

### 3. Siri Menurut Prespektif Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 disebutkan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedang dalam PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan, pasal 3 disebutkan:

<sup>41</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h.531



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinannya dilangsungkan
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Daerah.<sup>42</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara dengan tegas melarang adanya nikah siri dan setiap upacara pernikahan harus memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang. Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah siri dengan alasan pernikahan siri telah menimbulkan banyak korban, yang mana anak yang lahir dari pernikahan siri akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya.

Hanya dengan alasan itu pemerintah melarang sesuatu yang sah menurut syariat Islam, sementara disisi lain pemerintah seakan lupa berapa persen dari anak Indonesia yang lahir dari hubungan zina dalam setiap tahunnya. Dengan kata lain, perutaran pemerintah yang melarang nikah siri ini secara tidak langsung ikut berperan menyuburkan praktek zina di Indonesia<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta : New Merah Putih, 2009), h.53

<sup>43</sup> Abdul ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, (Jakarta intermasa 1991) hal. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Siri Menurut Prespektif Hukum Islam

Hukum nikah siri dalam Islam adalah sah sepanjang hal-hal yang menjadi dan rukun nikah terpenuhi, dimana rukun nikah dalam agama Islam adalah sebagai berikut

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi dari kedua belah pihak
- b. Adanya ijab ; yaitu ucapan penyerahan mempelai wanita oleh wali kepada mempelai pria untuk dinikahi
- c. Qabul; yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh mempelai pria (jawaban dari ijab)<sup>44</sup>

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan kehendak kedua belah pihak untuk saling mengingatkan diri.karena kedua belah pihak untuk saling mengikat diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain maka harus ada ungkapan ijab dan Kabul yang menjelaskan maksud-maksud diatas.<sup>45</sup>

Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-

<sup>44</sup> Lihat pula ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum islam.

<sup>45</sup> Vide *Ensiklopedi islamdidi*,diterbitkan oleh PT Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta,h.33



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan syariat. Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara.

Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik dari Skripsi yang berjudul Analisis Yurisprudensi Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil di Luar Nikah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang isbat nikah terhadap pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah berdasarkan kemaslahatan, filosofis dan yurisprudensi nomor Nomor KMA/032/SK/IV/2006..
2. Analisis Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri yang dilakukan setelah Hamil di Luar Nikah yaitu pernikahan siri yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam, dalam KHI pasal 53 ayat 1 dan sebagian ulama Hanafiyah menikahi wanita hamil akibat zina ialah sah, karena tidak ada larangan menikahi wanita hamil dan tidak ada terdapat dalil *qath'i* , menikahi wanita hamil akan berkait dengan masalah nasab dan pada intinya isbat nikah yang dikabulkan adalah untuk menghindari dari kemadharatan dan mendapatkan kemaslahatan.

#### B. Saran

1. Kepada para penegak hukum khususnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman agar bisa memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku nikah siri. Karena

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tidak adanya saksi yang tegas, semakin marak dan meraja lela pernikahan siri.

2. Kepada seluruh masyarakat, marilah kita bersama - sama mengikuti dan melaksanakan aturan - aturan yang ada sehingga kita dapat perlindungan hukum, dipermudah dalam segala urusan, dipandang sama dihadapan hukum dan tidak merasa dipandang sebelah mata atau dikucilkan oleh masyarakat. Salah satu contoh masalah pernikahan nikah siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah yang sudah penulis paparkan dengan sekuat tenaga tentang akibat - akibatnya yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Khusus bagi kaum wanita, hati - hati dalam memilih pasangan hidup dan jangan mau diajak untuk melakukan nikah siri , yakinlah dan percaya, bahwa nikah siri banyak merugikan kaum wanita dan anak - anak yang dilahirkan dari nikah siri tersebut.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Djazuli,2010. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah yang Praktis*,Jakarta: Kencana.
- Abd. Rahman Ghazaly,2003. *Fiqh Munakahat*,Bogor: Kencana.
- Abdul ghani Abdullah,1991.*Himpunan Perundang-Undangan Dan Peradilan Agama*, Jakarta intermasa.
- Ahmad Rofiq,2003. *Hukum islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Warson, 1984. *Munawir, Kamus Al - Munawir*, Surabaya: Progresif.
- Adhamdani, *risalah nikah*, 2002.Jakarta :pustaka amani.
- Alimin Patawari, 2019. *Mengakhiri Pengabdian Sebagai Hakim Di Bumi Lancang Kuning*, Pekanbaru :Yayasan Gahara Muda Sehati.
- Amir Syarifudiin, 2012.*Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pranada Media Grup.
- Amiruddin dkk, 2016.*pengantar metode penelitian hukum*, jakarta: PT Grafindo persada.
- Anshary,2014 *kedudukan, Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung, Redaksi Mandar Maju.
- Berkas penetapan nomor : 0066/pdt.p/2018PPg
- Burhanudin,*Nikah Siri Menjawab semua Pertanyaan Nikah Siri*,Jakarta:Pustaka Yustisia
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta : Pustaka.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,1991/1992.*kompilasi hukum islam di Indonesia*, Jakarta.
- Djazuli,2000.*Ushul Fiqh Metode Hukum Islam*,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- <https://wwwss.pa-pasirpengaraian.go.id>
- Jenderal Mahkamah Agung RI,2010. *Himpunan Peraturan Perundang - Undangan Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Badilag
- Kementrian Agama RI,2010.*Al quran dan Terjemahannya*, Jawa Barat: CV diponegoro.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Buku Tahunan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Ma'ruf Amin, 2011. *Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia sejak 1975*, Jakarta : Erlangga .

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Memed humaedillah, 2002. *akad nikah wanita hamil dan anaknya*, Jakarta : Gema Insani.

Mukti Arto, 1996. *Masalah Pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan, Mimbar Hukum No.28 tahun VII* Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinpa Era Islam,

Nashr Farid Muhammad Washil, 2016. *Qawaid Fiqhiyah*, Jakarta, Amzah.

Neng Djubaidah, 2010. *Pencatatan Perkawinan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Roihan A Rasyid, 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

Satria Efed M. zain, 2004. *problematika hukum keluarga islam kontemporer, analisis yuridisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media Grup.

Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1978. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita

Ssentyo Fajar Yuli, 2017 *Mengembangkan Perilaku Mengajar Yang Humanis*, Warta Hukum dan Perundang-Undangan, Jakarta: Pustaka

Thami dan Sohari sahrani, 2018. *fiqh munakahat*, jakarta : PT raja grafindo persada

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1995. Medan : Duta Karya.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 2009. Yogyakarta : New Merah Putih.



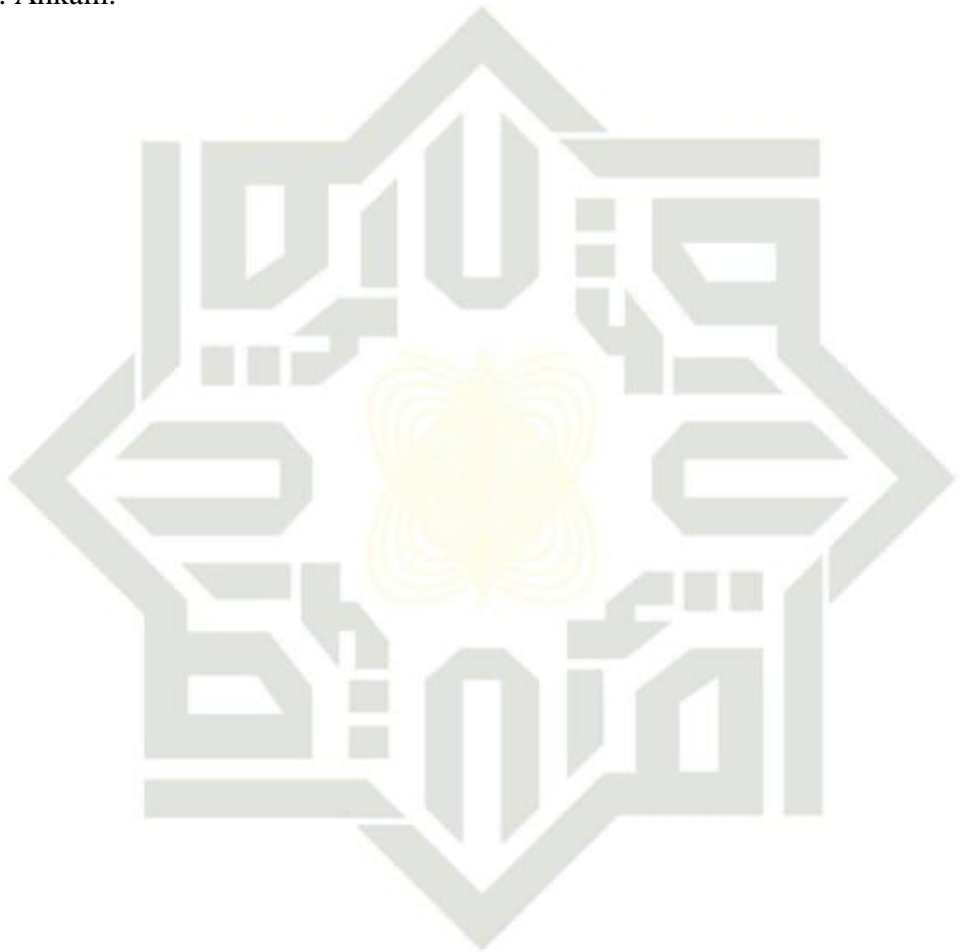
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vide *Ensiklopedi islam* didi, diterbitkan oleh PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Wahbah Al-Zuhaily, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, jilid VII, penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus.

Yayan sofyan, 2002. *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Jakarta selatan: Ahkam.



UIN SUSKA RIAU



**PENETAPAN**  
**Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ali Ibrahim bin Abdul Latif**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kaiti III, RT.001 RW.004, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Pemohon I**;

**Pina Susanti binti Syaprun Lbs**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kaiti III, RT.001 RW.004, Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Register perkara Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg pada tanggal 01 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 September 2013, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi wali nikah adalah abang kandung bernama Abdullah bin Syaprun Lbs dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Ismet dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Bariah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
2. Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syar'iat Islam;
  3. Bahwa sebelum menikah saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
  4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama yaitu :
    1. Ahmad Alpin (laki-laki) umur 4 tahun;
    2. Nur Akila (perempuan) umur 3 tahun;
  5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
  6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ( Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan kelengkapan pengurusan kartu keluarga (KK) kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran anak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Ibrahim bin Abdul Latif) dengan Pemohon II (Pina Susanti binti Syaprun Lbs) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah mengumumkannya kepada masyarakat sebagaimana telah diumumkan pada tanggal 06 September 2018 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya saja ada perubahan pada posita poin satu mengenai tempat nikah dalam permohonan tertulis di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu seharusnya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Tersono, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Emiwati binti Anwar**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 005 Desa Rambah Tengah Barat, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan saksi adalah keponakan Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya tapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan September tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i yaitu adanya calon mempelai, dua orang saksi wali dan adanya ijab kabul;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada abang kandung dari Pemohon II bernama Abdullah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saksi yang bernama Ismet dan Ali;

Bahwa mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa setahu saksi sampai saat ini terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dari masyarakat;

Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak tercatat karena Pemohon II saat itu sudah hamil duluan;

Bahwa setahu saksi untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran anak dan yang paling penting untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rambah;

2. **Ismet Nasution bin Abd. Latif**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan, SD, pekerjaan Buruh Harian lepas (tukang bangunan) bertempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, menerangkan saksi adalah adik Pemohon I dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya tapi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada bulan September tahun 2013;

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i yaitu adanya calon mempelai, dua orang saksi wali dan adanya ijab kabul;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Desa Rambah Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II kemudian diwakilkan kepada abang kandung dari Pemohon II bernama Abdullah;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri 2 (dua)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saksi yang bernama saksi sendiri dan Ali;

Bahwa mahar/ maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Bahwa setahu saksi sampai saat ini terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatan dari masyarakat;

Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena tidak tercatat karena Pemohon II saat itu sudah hamil duluan;

Bahwa setahu saksi untuk mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran anak dan yang paling penting untuk mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rambah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon penetapan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari persidangan untuk perkara ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan halangan perkawinan itu identik dengan BAB II tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama Emiwati binti Anwar dan Ismet Nasution bin Abd. Latif, dimana saksi-saksi tersebut tidak ada halangan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana dalam duduk perkara ini dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172, 175, 308 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa kedua orang saksi mengetahui



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan menyaksikan langsung prosesi akad nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara syari'at Islam pada tanggal 19 September 2013 di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syaprun Lbs kemudian diwakilkan kepada abang kandung Pemohon II bernama Abdullah bin Syarpun Lbs disaksikan oleh Ismet dan Ali dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai. Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan gadis, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan ataupun menggugat pernikahan tersebut dan selama itu pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk adanya bukti pernikahan dan untuk mengurus Kartu Keluarga, KTP dan akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 14 dan pasal 21 ayat (1) bagian pertama, serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada pula halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam sehingga permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Ibrahim bin Abdul Latif dengan Pemohon II (Pina Susanti binti Syaprun Lbs) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Zulkifli Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan di bantu oleh Burhanuddin, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim Anggota,

dto

**Zulkifli Firdaus, S.H.I**

Hakim Anggota,

dto

**Yustini Razak, S.H.I., M.H**

Ketua Majelis,

dto

**Rahmat Arijaya, S.Ag., M.Ag**

Panitra ,

dto

**Burhanuddin, S.H., M.H**

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 140.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp. 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) Salinan sesuai dengan

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pasir Pengaraian, \_\_\_\_\_ 2018  
**Panitera,**

**Burhanuddin, S.H., M.H**





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah* yang ditulis oleh :

Nama : Sukni Rusidah  
NIM : 11521205046  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 30 Desember 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Lantai 3 (tiga) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, M.Ag**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fathullah, M.Ag**

Mengetahui :

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan Dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**  
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/7176/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUKNI RUSIDAH  
N I M : 11521205046  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 8 AGISTUS 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 2 September 2019

Dekan,

  
Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 195807121986031005



UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5784/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 15 Juli 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SUKNI RUSIDAH  
NIM : 11521205046  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan agama pasir pengaraian

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Analisa hakim pengadilan agama no 0066/pdt.p/2018/PA.PpgTentang isbat nikah terhadap  
pernikahan siri yang dilakukan setelah hamil diluar nikah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

#### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/24314  
T E N T A N G



032010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5784/2019 Tanggal 15 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SUKNI RUSIDAH**
2. NIM / KTP : **11521205046**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISA HAKIM PENGADILAN AGAMA NO 0066/PDT.P/2018/PA.PPG TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH HAMIL DI LUAR NIKAH**
7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :  
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
- Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaralan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : dpmptsp@rokanhulukab.go.id Website : http : //dpmptsp.rokanhulukab .go.id

### REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/212

Tentang

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24314 tanggal 15 Juli 2019 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / PraRiset dan pengumpulan Data untuk bahan **Skripsi**, dengan ini dapat diberikan rekomendasi kepada :

Nama : SUKNI RUSIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 11521205046  
Jurusan : Hukum Keluarga  
Jenjang : S-1 (Strata 1)  
Judul Penelitian : **Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama No.0066/PDT.P/2018/PA.PPG tentang Isbat Nikah terhadap Pernikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil di Luar Nikah**  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal : 17 Juli 2019

an. BUPATI ROKAN HULU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU



Ridarmanto, S.IP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197210061992011002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kementerian Agama Pasir Pengaraian
3. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
5. Yang bersangkutan





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Itan Syarif Kasim Riau



### PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Jalan Diponegoro No. 10-11 Telp. ( 0762 ) 91430

Website: <http://www.pa-pasirpengaraian.go.id> - email: [papasirpengaraian@gmail.com](mailto:papasirpengaraian@gmail.com)

PASIR PENGARAIAN – 28557

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A7/t88 /HK.05/10/2019

Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/212 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: SUKNI RUSIDAH
NIM	: 11521205046
Program studi/ jurusan	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S-1 (Strata 1)
Semester	: 9
Kampus	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Judul penelitian	: Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg tentang Isbat Nikah terhadap Pemikahan Siri yang Dilakukan Setelah Hamil di Luar Nikah

telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data yang diperlukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Pasir Pengaraian, 22 Oktober 2019

Panitera

Bunharuddin, S.H, M.H

NIP. 19680929 200212 1 001





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## JURNAL HUKUM ISLAM

### Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 – 085213573669

#### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SUKNI RUSIDAH**  
NIM : **11521205046**  
Jurusan : **HUKUM KELUARGA**  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NOMOR 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg TENTANG ISBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRI YANG DILAKUKAN SETELAH HAMIL DILUAR NIKAH**

Pembimbing : **Hairul Amri,M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 Januari 2020

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 198804302019031010

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Sukni Rusidah, lahir di Surau Munai Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 26 Oktober 1996 merupakan anak ke tiga dari tiga (3) bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Muhammad Yusuf dan Ibunda Kartini. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SDN 003 Rambah Hilir pada tahun 2009 kemudian melanjutkan pendidikan ke MTs Dar El Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2011 lalu melanjutkan pendidikan ke MA Dar El Hikmah Pekanbaru dan lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2015 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Hukum Keluarga.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanallah WaTa'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA.Ppg Tentang Isbat Nikah Terhadap Pernikahan Siri Yang Dilakukan Setelah Hamil Diluar Nikah”** di bawah bimbingan langsung Bapak Hairul Amri, M.Ag. berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 30 Desember 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana hukum (SH).